

**PEMAHAMAN POLITIK DAN IDENTIFIKASI KEPARTAIAN
GENERASI MUDA
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU MEMILIH**

Oleh : Suryanef

ABSTRACT

This research aims to describe the factors which influence the voting behavior of young generation in general election 1999 in Padang Timur, West Sumatra. There are two clarified variables that are used. They are : political comprehension and party identification. While the problems of this research are: Firstly, how much significance of political comprehension and party identification influence the voting behavior of young generation? Secondly, in all of that determine factors, which one is the most influence toward the voting behavior of young generation? Questionnaires were distributed to 96 respondents in five kelurahan in Kecamatan Padang Timur. The data was analyzed by multi-regression methods. The result of analysis shows that there is a significance influence from political comprehension and party identification simultaneously toward the voting behavior. These two variables can give explanation about the voting behavior 54,48%, where as the biggest contribution is given by political comprehension about 68,16%.

Key Words: *Pemahaman Politik, Identifikasi Kepartaian,
Perilaku Memilih*

I. PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menentukan perilaku memilih generasi muda dalam pemilu 1999 di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Dengan demikian, unit analisisnya adalah perilaku memilih generasi muda. Mengapa generasi muda yang diteliti? Terdapat dua alasan yaitu : *Pertama*, secara teoritis kaum muda diasumsikan mempunyai perilaku politik yang khas. Kekhasan perilaku politik kaum muda menurut *Eric Ericson* terletak pada komitmennya yang kuat terhadap kepentingan-kepentingan politik kaumnya, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihan politiknya dan selalu memihak rakyat banyak atau kepentingan umum dan sebagainya (Pomper, 1975). *Kedua*, kaum muda memiliki potensi yang besar dalam menentukan perolehan suara pada suatu pemilu. Potensi ini terlihat dari besarnya jumlah pemilih muda, dimana rata-rata sebanyak 64,5% dalam pemilu 1999 pada masing-masing propinsi di Indonesia. Dengan kondisi objektif

ini maka potensi kaum muda dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi mereka berpotensi dimobilisasi sementara di sisi lain mereka pun berpotensi melakukan kontra mobilisasi. Selain faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, maka faktor reformasi politik yang tengah bergulir juga menjadi determinan yang menentukan bagi dilakukannya penelitian ini.

Bertolak dari pokok pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah : *Pertama*, seberapa signifikan pemahaman terhadap politik dan identifikasi kepartaian secara simultan mempengaruhi perilaku memilih generasi muda di Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada pemilu 1999? *Kedua*, diantara faktor determinan tersebut manakah yang merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku memilih generasi muda Kecamatan Padang Timur Kota Padang?

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang fenomena perilaku memilih maka teori *voting behavior* menjadi sandaran utama dalam menemukan faktor-faktor determinan yang menentukan preferensi politik seseorang. Dalam *voting behavior* ada dua mazhab yang sangat dominan dan masih tetap menjadi sumber kajian yang sangat menarik. Kedua mazhab tersebut adalah : *pertama*, apa yang disebut *Mazhab Columbia* dan *kedua*, *Mazhab Michigan*.

Mazhab Columbia yang lebih dikenal dengan pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur (tua-muda), jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih (Imawan, 1993). Oleh karena itu pendekatan ini beranggapan bahwa preferensi pilihan terhadap salah satu partai politik merupakan produk dari karakter sosial individu yang bersangkutan (Gaffar, 1992).

Sementara itu Mazhab Michigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku memilih. Pendekatan ini dibangun dari asumsi yang mengatakan bahwa penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi.

Sikap dan tingkah laku politik seseorang antara lain ditentukan oleh apa yang terkandung di dalam dirinya sendiri, seperti idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis keinginan dan kehendak hati. Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan pentingnya fungsi sikap itu sendiri. *Greenstein* dalam *Personality and Politics* (1975) mengungkapkan fungsi sikap itu yakni : *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya,

penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dari pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (*defence mechanism*) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.

Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses sosialisasi politik yang dialaminya sepanjang hidupnya. Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik serta merupakan sarana bagi generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Almond (ed.), 1974).

Melalui proses sosialisasi politik tersebut akan terbentuk ikatan psikologis seseorang dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu yang berwujud simpati terhadap organisasi atau partai politik tersebut. Ikatan psikologis inilah yang disebut identifikasi partai (*party identification*). Identifikasi partai ini merupakan konsep penting dalam pendekatan psikologis, sebagaimana yang dinyatakan Czudnowski (1976) bahwa “*this approach also particularly adequate for the analysis of voting in the United States, where “party identification” has been found to be the single most important variable determining voting preferences.*”

Berdasarkan beberapa pemikiran yang dipaparkan oleh para ahli tentang pendekatan psikologis, dapat dipahami bahwa bagi penganut psikologis sudah menjadi aksioma adanya hubungan pengaruh antara identifikasi partai dengan perilaku pemilih. Pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.

Kedua pendekatan yang dikemukakan sebelumnya telah digunakan oleh sarjana ilmu politik sebagai acuan dalam memahami perilaku pemilih di negara Amerika, Eropa, Asia dan sebagainya. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk menerapkan model-model pendekatan di atas di Indonesia harus disesuaikan dengan kultur dan kenyataan objektif yang ada serta harus lebih hati-hati dan selektif. Oleh karena itu dalam mencermati perilaku memilih generasi muda di Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada pemilu 1999, studi ini menggunakan dua variabel penjelas berikut : *pemahaman politik dan identifikasi kepartaian*.

Pemahaman terhadap politik maksudnya adalah seberapa jauh seseorang individu mampu menginterpretasikan dan mengaktualisasikan dirinya dalam memahami berbagai fenomena politik. Pemahaman ini sangat ditentukan oleh proses “belajar” atau proses sosialisasi yang diterima dalam kehidupannya. Sosialisasi dalam konteks ini adalah sosialisasi politik.

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan juga mereka yang menginjak dewasa. Prinsip dari sosialisasi itu adalah *“on transmission between generations and thus on continuity within the polity”* (Wasby, 1970). Dari hal ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa individu yang dijadikan objek sosialisasi politik bukan bersifat pasif dan hanya menerima saja, melainkan individu yang mengalami proses sosialisasi sekaligus juga aktif mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik di mana ia hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat Rush dan Althoff serta Kavanagh.

Menurut Rush dan Althoff, sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Wasby, 1970). Pendapat ini senada dengan pandangan Kavanagh (1982) yang menyatakan bahwa proses sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi politiknya.

Sosialisasi politik selanjutnya diharapkan akan membentuk pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai fenomena politik. Adanya preferensi individu terhadap fenomena politik dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih dalam pemilu. Hal ini sesuai dengan tujuan sosialisasi politik yaitu membentuk sikap yang mendukung sistem politik dan menyadarkan individu akan perannya sebagai partisipan dalam politik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Irish dan Frank (1978) berikut ini :

“process where individual members of a state acquire their feelings and behavioral attitudes about government and politics generally, their sense of national identification, loyalty to their government, allegiance to the leadership, and their understanding of roles they expect (or are expected) to play as participants in the political system”

Dengan tujuannya yang seperti itu, maka sosialisasi politik akan mampu membangun pengetahuan, sikap dan penilaian seseorang terhadap fenomena politik yang terjadi. Hal ini selanjutnya akan mendorong seseorang untuk menentukan preferensi politiknya dalam hal ini perilaku memilih dalam pemilu.

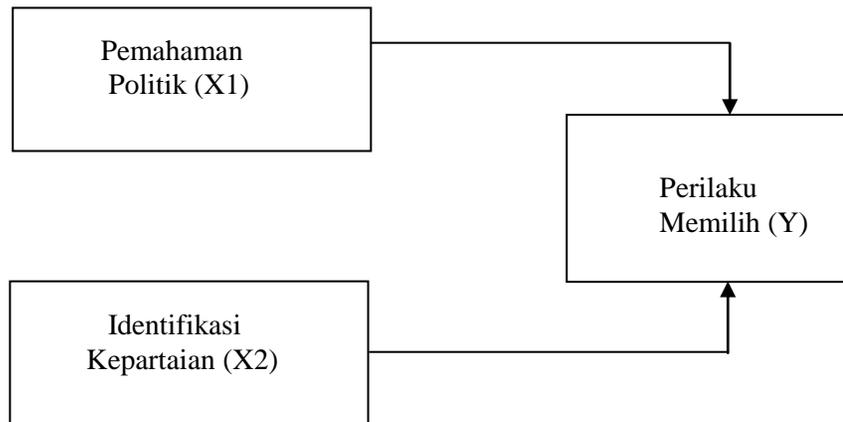
Pemahaman politik dapat dicermati antara lain melalui tingkat pemahaman terhadap hak-hak politik, frekuensi individu membicarakan masalah-masalah politik, tingkat ketertarikan individu terhadap masalah-masalah politik, respon individu terhadap peristiwa politik sehari-hari dan sebagainya.

Sementara itu identifikasi kepartaian adalah ikatan emosional individu dengan suatu partai. Ikatan itu merupakan identifikasi psikologis

tanpa pengakuan formal atau dinyatakan dalam bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak harus konsisten untuk mendukung suatu partai. Identifikasi partai itu sudah diperoleh dari masa kanak-kanak dan dianggap relatif stabil dalam kehidupan seseorang, tetapi kadang-kadang bisa menguat atau melemah sewaktu masa dewasa. Peranan identifikasi partai mungkin menurun atau kurang signifikan untuk menjelaskan perilaku memilih apabila faktor isu dan kandidat lebih dominan. Tetapi manakala individu tidak memiliki persepsi yang utuh tentang isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai akan sangat kuat (Gaffar, 1992).

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari uraian sebelumnya adalah : *Pertama*, identifikasi partai adalah orientasi dan sikap yang dimiliki seseorang atau anggota masyarakat sehingga mereka merasa dekat dengan partai atau organisasi politik tertentu. *Kedua*, identifikasi partai diperoleh melalui proses yang lama sejak masa kanak-kanak dan berkembang terus sampai dewasa. *Ketiga*, walaupun identifikasi partai bisa menguat dan melemah pada seseorang namun konsep ini tetap relevan untuk menjelaskan perilaku memilih karena identifikasi partai sudah terbentuk sejak dini dalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan pemahaman teoritis dan permasalahan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam studi ini adalah : *Pertama*, terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman politik dan identifikasi kepartaian terhadap perilaku memilih generasi muda di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *Kedua*, identifikasi kepartaian adalah variabel yang paling dominan dalam menentukan perilaku memilih generasi muda di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Oleh karena itu maka model hubungan antar variabel dalam menjelaskan perilaku memilih adalah sebagaimana tergambar pada diagram berikut :



II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menguji hipotesis. Data diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada 96 responden. Jumlah responden diperoleh dengan menggunakan formula Frank Lynch (Surachmad, 1989). Selanjutnya responden dipilih secara random pada lima kelurahan di Kecamatan Padang Timur yaitu Kelurahan Aur Duri, Parak Gadang Barat, Parak Gadang Timur, Air Camar dan Simpang Haru Selatan. Kuesioner disusun dalam bentuk daftar pertanyaan dan jawaban yang disusun dalam skala Likert karena elemen-elemen yang ada mengandung unsur interval. Hasil jawaban diberi skor dengan rentangan 1-5. Sedangkan pengklasifikasiannya untuk setiap variabel adalah sebagai berikut :

No.	Skala Interval	Kategori		
		Derajat Pemahaman Politik	Derajat Identifikasi Kepartaian	Derajat Perilaku Memilih
1.	4,21 – 5,00	Sangat baik	Sangat kuat	Sangat aktif
2.	3,41 – 4,20	Baik	Kuat	Aktif
3.	2,61 – 3,40	Cukup baik	Cukup kuat	Cukup aktif
4.	1,81 – 2,60	Kurang	Lemah	Tidak aktif
5.	1,00 – 1,80	Kurang sekali	Lemah sekali	Sangat tidak aktif

Analisis data menggunakan metode statistik multi regresi, karena penelitian ini mengkaji pengaruh lipat-ganda dari sejumlah variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Metode ini memungkinkan ilmuwan behavioral menyelami fenomena secara lebih mendalam dan realistis (Kerlinger, 1993). Dalam konteks ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan komputer (*program SPSS/PC+*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga hal pokok yang menjadi fokus bagian ini yaitu : (1) analisis variabel penelitian ; (2) korelasi antar variabel penelitian ; dan (3) pengujian hipotesis.

1. Analisis Variabel Penelitian

a. Pemahaman Politik

Pemahaman politik berhubungan dengan aspek kognisi, afeksi dan evaluasi terhadap realitas politik yang ada. Oleh karena itu pemahaman politik akan berimplikasi terhadap kesadaran seseorang untuk menentukan posisi dalam suatu kondisi politik termasuk dalam menyikapi program yang ditawarkan oleh kontestan pemilu. Dalam konteks ini

tingkat pemahaman politik responden dijabari dengan menelusuri bagaimana pemahamannya terhadap hal-hal berikut : *pertama*, hak dan kewajiban individu dalam sistem politik ; *kedua*, fungsi organisasi sosial politik ; dan *ketiga*, proses pelaksanaan pemilu.

Adapun tingkat pemahaman responden terhadap hak dan kewajiban individu dalam sistem politik pada umumnya baik (57,29%). Selanjutnya 42,71% lainnya terdistribusi pada kategori sangat baik (12,50%), cukup baik (9,38%), kurang (11,46%) dan kurang sekali (9,37%).

Pemahaman akan hak dan kewajiban ini sebenarnya menarik untuk diperhatikan. Selama ini setiap individu di Indonesia tidak menempati posisi sebagai warga negara secara utuh melainkan sebagai warga masyarakat yang dihadapkan dengan negara, rakyat yang dihadapkan pada penguasa atau massa yang dihadapkan pada elite. Sebagai warga masyarakat, setiap individu memulai dan mengakhiri hidupnya di dalam batas-batas dan kontrol negara. Setiap individu, sebagai bagian dari rakyat, digambarkan orang kebanyakan yang bodoh, miskin, rakus, tidak beradab, dan sebagainya, sehingga harus selalu dibina oleh pemerintah. Mereka harus selalu patuh pada pemerintah. Di tempat lain, rakyat selalu dimanipulasi oleh berbagai komponen bangsa bahwa mereka bertindak atas nama rakyat. Setiap pejabat akan selalu bilang bahwa apa yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat banyak, meski mereka menindas banyak individu yang termasuk dalam bagian rakyat. Sebagai bagian dari massa, setiap individu adalah barang mainan yang selalu dimanipulasi oleh para elite politik untuk kepentingan politik mereka. Massa digambarkan sebagai kerumunan anarkhis yang mudah menimbulkan keributan.

Karena itu, secara substansial setiap individu selama ini lebih mengenal kewajibannya daripada hak-haknya sebagai warga negara. Demikian juga dengan para responden penelitian yang mengaku paham akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketika penulis melakukan wawancara dengan sebagian responden, mereka paham akan hak-hak warganegara karena menggunakan rujukan konstitusi UUD 1945. Dalam konstitusi itu secara normatif ditegaskan akan hak-hak politik, sosial dan ekonomi warga negara. Tetapi pengetahuan mereka akan hak-hak itu tidak ditransformasikan menjadi bentuk perjuangan untuk menegakkan hak-hak warga negara yang selama ini hilang karena ditindas oleh negara.

Jika pemahaman responden akan hak-hak dan kewajiban relatif baik maka pemahaman terhadap posisi dan fungsi organisasi-organisasi politik dan pemilihan umum sebagai bentuk mekanisme demokrasi juga baik. Hal ini dibuktikan oleh realitas bahwa separoh dari responden (50%) mempunyai tingkat pemahaman yang baik tentang fungsi organisasi sosial politik, 25% sangat baik, 8,33% cukup baik, 13,54% kurang dan hanya 3,13% saja yang kurang sekali. Sedangkan tingkat pemahaman responden terhadap proses pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa mayoritas responden (56,25%) mempunyai tingkat pemahaman yang baik terhadap proses pelaksanaan pemilu. Sebesar 15,63% sangat

baik, responden lainnya berada pada taraf cukup baik sebesar 10,42%, kurang sebesar 12,5% dan kurang sekali hanya sebesar 5,20%.

Beranjak dari penelusuran pemahaman responden dalam hal hak dan kewajiban individu dalam sistem politik, fungsi organisasi sosial politik serta proses pelaksanaan pemilu, maka dapatlah kita klasifikasikan bagaimana sesungguhnya tingkat pemahaman politik responden. Profil pemahaman responden terhadap politik adalah sebagai berikut 60,42% responden mempunyai pemahaman politik yang baik, 14,58% pada derajat sangat baik, cukup baik 13,54%, kurang 11,46% dan tak satupun dari responden yang kurang sekali pemahamannya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa generasi muda Kecamatan Padang Timur Kota Padang umumnya memiliki pemahaman politik yang memadai sebagai modal untuk lebih rasional menentukan preferensi politiknya dalam pemilu 1999.

Akan tetapi pemahaman politik yang baik tidak identik dengan kuatnya konfidensi individu terhadap lembaga-lembaga politik dan juga tidak identik dengan kuatnya budaya demokratis. Para generasi muda umumnya memahami betul tentang sistem politik, pemilihan umum dan demokrasi, tetapi tidak jarang di antara mereka yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik. Ketidakpercayaan bisa merupakan pantulan dari sikap kritis tetapi juga bisa merupakan sikap yang pesimis atau bahkan apatis terhadap lembaga-lembaga politik. Bagaimana pun juga mekanisme dan lembaga-lembaga demokrasi tersebut bisa berjalan dengan baik apabila memperoleh masukan (input) dari masyarakat, baik yang berbentuk *demand* (kritik, tuntutan, kontrol) maupun *support* (kepercayaan, kepedulian, dukungan). Input *demand* selalu dibutuhkan untuk mengontrol dan memelihara agar pemerintahan selalu berasal “dari” rakyat, ditentukan “oleh” rakyat dan dimanfaatkan kembali “untuk” rakyat. Kalau tidak ada *demand* yang kuat dari masyarakat, maka prinsip-prinsip demokrasi tersebut tidak bakal berjalan dengan baik. Pemerintahan akan cenderung otoriter, korup, dan menindas rakyat banyak. Pengalaman buruk yang terjadi selama puluhan tahun Orde Baru sebenarnya memberi petunjuk betapa lemahnya *demand* dan *support* dari masyarakat, meskipun masyarakat sudah mempunyai pemahaman politik yang baik bahwa kinerja pemerintahan Orde Baru tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Data pemahaman politik yang relatif baik di kalangan generasi muda di atas memang masuk akal, sebab generasi muda selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai lapisan masyarakat yang mempunyai citra “istimewa.” Mereka adalah lapisan terdidik yang mempunyai pengetahuan sosial-politik yang relatif lebih komprehensif sehingga mampu memberi gambaran tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi generasi muda menyebabkan mereka peka dan kritis memahami kondisi obyektif di sekitarnya. Mereka sebagai kelompok terdidik dapat membandingkan bang-

sanya dengan standar negara-negara maju, yang pada gilirannya hal ini membangkitkan kesadaran akan kelemahan dan kekurangan bangsanya. Pemahaman terhadap lingkungannya menimbulkan benturan-benturan antara nilai-nilai idealitas dan realitas obyektif yang kemudian menyebabkan munculnya idealisme dan aktivisme politik generasi muda. Hampir di banyak negara generasi muda merupakan motor yang mengambil sikap oposisi terhadap rezim yang berkuasa, antara lain mengecam kebijakan yang bermasalah, melawan penindasan pada rakyat kecil, menentang depolitisasi, menentang para pemimpinnya yang tidak bertanggungjawab, menuntut keadilan dan sebagainya. Di Indonesia, perubahan politik dari masa kebangkitan nasional hingga kejatuhan Soeharto, selalu melibatkan generasi muda terutama mahasiswa sehingga tidak berlebihan bila mereka dianggap sebagai barisan terdepan dalam agen perubahan sosial.

b. Identifikasi Kepartaian

Identifikasi kepartaian merupakan faktor yang berperan dalam menentukan perilaku politik dalam pemilu. Ia dapat dikatakan sebagai kombinasi perasaan dan sikap yang berwujud simpati terhadap partai politik. Jadi dalam konteks ini yang terbangun pada diri individu adalah kedekatan emosional yang tidak terikat pada formalitas administrasi. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, identifikasi partai mempunyai dua makna sekaligus. *Pertama*, adalah keterikatan seseorang pada partai tertentu. Orang misalnya akan mengidentifikasi dirinya pendukung PPP, PDI-Perjuangan, PAN ataupun Golkar, sementara yang lain mendukung partai lainnya. *Kedua*, sikap, derajat dukungan atau keterikatan secara psikologis seseorang pada partai yang ia identifikasi, yang kemudian diukur dengan skala interval. Di sini akan diketahui apakah keterikatan dan dukungan seseorang pada salah satu partai dari 48 partai yang menjadi kompetitor pemilu 1999 itu kuat atau lemah.

Hasil penelitian menunjukkan ada lima partai politik yang memperoleh simpati di kalangan generasi muda Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Kelima partai itu adalah PAN, PPP, PDI-Perjuangan, PBB serta Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa partai lainnya kurang populer di sini. Lebih jauh penyebaran responden berdasarkan identifikasi kepartaiannya adalah 38 (39,58%) PAN. Sementara itu 22 (22,92%) dengan PPP, 15 (15,63%) mengidentifikasikan dirinya dengan PDI-Perjuangan, 12 (12,5%) dengan PBB. Golkar yang mendominasi pemilu-pemilu sebelumnya ternyata hanya sejumlah 9 (9,37%) responden yang merasa paling dekat dengan partai ini. Ketidakpopuleran ini barangkali disebabkan oleh “kekeliruan” yang telah diperbuat Golkar di masa lalu terutama sebagai penyangga pemerintahan Orde Baru.

Sementara itu berkaitan dengan reaksi responden terhadap pelecehan pada partainya ternyata sebagian besar responden (44,79%) menyatakan tersinggung dan memendamnya dalam hati, 25% sangat

tersinggung dan memberikan teguran, 16% biasa-biasa saja, 8,22% tidak peduli dan hanya 5,21% saja yang menyatakan sangat tersinggung dan bereaksi secara fisik. Apakah argumen responden untuk memberikan dukungan terhadap PAN, PPP, PDI-Perjuangan, PBB, atau Golkar ?

Berdasarkan data empiris, terdapat empat alasan mengapa responden mengidentifikasi diri dengan partai pilihannya. Keempat alasan tersebut sebagai berikut : *Pertama*, partai pilihannya adalah partai yang disegani, dimana sejumlah 85,22% memberikan respon positif untuk pernyataan ini. *Kedua*, partai tersebut merupakan partai yang reformis yang didukung sejumlah 82% responden. *Ketiga*, semua responden (100%) menyatakan bahwa partai tersebut sesuai dengan aspirasi politiknya. *Kempat*, sejumlah 72,91% menyatakan bahwa pilihan terhadap partai disebabkan oleh keterlibatannya dalam kegiatan partai tersebut. Selanjutnya juga dapat dilacak bahwa responden menyatakan ketidaksetujuannya apabila pilihan terhadap salah satu partai pada pemilu 1999 yang lalu disebabkan oleh karena pilihan orang tuanya ataupun pilihan atasannya, dengan proporsi masing-masing adalah 94,79% dan 82,30%. Selain itu responden juga menyatakan keengganannya apabila pilihan terhadap partai tersebut karena ia menjadi pengurus (100%) ataupun karena temannya menjadi pengurus partai tersebut (96%). Sementara itu jawaban responden yang agak bervariasi ditemukan pada pernyataan bahwa partai pilihannya akan memperjuangkan nasib umat Islam, yaitu 54,17% untuk yang menyatakan kesetujuannya, serta 45,83% untuk yang tidak setuju. Disamping itu sebagian besar responden (71,87%) menyatakan bahwa pilihan terhadap partai tersebut bukan disebabkan oleh karena mereka mendapatkan pendidikan di lingkungan partai.

Pemaparan temuan sebelumnya juga memberikan indikasi bahwa responden memberikan respon yang positif terhadap kehadiran partai-partai baru dalam pemilu 1999. Dari 96 responden menyatakan diri berafiliasi dengan PAN sejumlah 38 (39,58%) responden, 15 (15,63%) responden dengan PDI-Perjuangan serta 12 (12,5%) responden dengan Partai Bulan Bintang. Hal ini membuktikan bahwa bagi generasi muda kehadiran partai baru merupakan suatu keniscayaan. Bertolak dari dukungan responden terhadap partai-partai baru, kita dapat menarik kesimpulan bahwa generasi muda pada dasarnya menuntut adanya perubahan sekaligus pembaharuan dari sistem politik yang berlangsung selama ini. Penjelajahan terhadap berbagai gejala yang dikemukakan sebelumnya pada akhirnya menunjukkan distribusi derajat identifikasi kepartaian daripada responden berada pada derajat yang sangat kuat dan kuat dengan proporsi yang berimbang yaitu sejumlah 35 (36,56%) dan 39 (40,63%). Sedangkan sisanya berada pada derajat cukup kuat sejumlah 9 (9,27%) responden serta 13 (13,54%) yang identifikasi kepartaiannya lemah. Hal lain yang juga ditunjukkan realitas ini adalah bahwa tak satu pun responden yang identifikasi kepartaiannya lemah sekali.

c. Perilaku Memilih

Perilaku memilih merupakan refleksi identifikasi kepartaian yang bermuara kepada preferensi politik individu memilih partai politik tertentu dalam suatu pemilu. Disamping itu perilaku memilih akan teraktualisasi dalam bentuk aktivitas individu mendukung partainya. Dalam konteks ini partai politik yang menjadi pilihan responden dalam pemilu 1999 adalah 39,58% memilih PAN, 22,92% memilih PPP, 15,63% memilih PDI-P, 10,42% memilih PBB, serta 7,29% memilih Golkar dan hanya 4,16% di antaranya yang memilih partai lain. Realitas ini semakin mempertegas bahwa sulit bagi salah satu partai meraih kemenangan mutlak dalam perolehan suara di era multi-partai seperti yang terjadi pada pemilu 1999 ini.

Berdasarkan data di atas kita temukan bahwa pada umumnya responden yang mengidentifikasi diri dengan PAN, PPP dan PDI-Perjuangan cenderung memilih partai yang sama pada saat pemungutan suara berlangsung. Temuan lain adalah terjadinya penyimpangan sebesar 2,08% antara identifikasi kepartaian dengan pilihan responden terhadap PBB dan Golkar, dimana selanjutnya responden yang menyimpang ini berafiliasi dengan partai lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa responden yang berafiliasi dengan PBB dan Golkar identifikasi kepartaiannya dapat berubah manakala pemungutan suara berlangsung.

Apakah yang menjadi faktor penentu dari pilihan partai responden dalam pemilu 1999? Pertanyaan kritis ini sebenarnya bisa dijadikan basis untuk mengidentifikasi antara tipe pemilih rasional-otonom dengan pemilih tradisional-mobilisasi. Pemilih rasional-otonom adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena didasari oleh pertimbangan dan kesadaran sendiri, misalnya dengan memperhatikan program-program partai. Sebaliknya pemilih tradisional-mobilisasi adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya karena dimobilisasi oleh orang lain, dan tidak peduli akan pertimbangan rasional seperti program partai.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebesar 84,36% responden tergolong sebagai pemilih rasional-otonom, karena memilih atas dasar pertimbangan sendiri. Mereka menentukan pilihannya relatif kebal (*immune*) terhadap intervensi, tekanan ataupun paksaan dari pihak lain. Sisanya, 15,64% responden tergolong dalam kategori pemilih tradisional-mobilisasi. Di antara mereka ada yang mengikuti saran dari keluarga dan pengaruh teman sejawat nampak berimbang yaitu 5,21% dan 6,25%. Responden lainnya dalam memilih partai disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan bekerja nampaknya sangat kecil dibandingkan faktor lainnya yaitu 2,5%, dan satupun dari responden yang dapat di mobilisasi pihak lain.

Sehubungan dengan hal ini, *Afan Gaffar* (1998 : 22) menyatakan bahwa membesarnya pemilih otonom ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat ketergantungan masyarakat secara politik dan ekonomi pada

negara. Di samping itu juga ditandai oleh munculnya “euforia kebebasan” sebagai implikasi reformasi yang bergulir sehingga memungkinkan bagi setiap pemilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan partai mana pun tanpa ada intimidasi ataupun intervensi negara.

Setelah menganalisis variabel perilaku memilih pada skala nominal di atas, peneliti akan menganalisis variabel itu pada skala interval, yaitu melacak sejauh mana tingkat aktivitas atau dukungan fisik responden pada partai yang mereka pilih masing-masing. Jika derajat aktivitas dukungan responden ditransformasikan kedalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah maka derajat aktivitas responden mengikuti pawai dalam kampanye umumnya (71,87%) tinggi, 11,46% sedang dan 16,67% saja yang rendah. Untuk aktivitas mengajak orang lain mengikuti kampanye partai yang didukung, penyebaran proporsinya masing-masing sebagai berikut 70,83% tinggi, 8,33% sedang dan 20,84% rendah. Dalam hal memasang tanda gambar partai, spanduk dan lain-lain temuan menunjukkan bahwa mayoritas (66,67%) responden aktivitasnya tinggi, 15,63% sedang dan sisanya 17,71% rendah. Sementara itu dalam upaya mengajak orang lain untuk memilih partai yang didukung penyebarannya agak merata antara yang tinggi sejumlah 26,04%, sedang 36,46%, dan rendah 37,5%. Sedangkan untuk mengikuti temu kader atau pengarahan dari pengurus partai ternyata sebagian besar responden (76,05%) aktivitasnya dalam kategori tinggi, sedang 7,29% dan 16,66% lagi rendah.

Dengan penelusuran terhadap aktivitas responden dalam mendukung partainya, maka dapat diklasifikasikan perilaku memilih responden. Umumnya (53,12%) perilaku memilih responden aktif, sangat aktif 22,91%, cukup aktif 13,54%, 9,27% tidak aktif dan hanya 1,16% saja yang sangat tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda mempunyai kecenderungan berperilaku sangat aktif dalam memberikan dukungan terhadap partainya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika partai politik mencari formula yang tepat untuk meraih simpati dari segmen pemilih yang potensial ini.

2. Analisis Korelasi Antar Variabel Penelitian

a. Korelasi antara Pemahaman Politik (X₁) dengan Perilaku Memilih (Y)

Koefisien korelasi antara keduanya ($r_{X_1, Y}$) adalah .735 pada $p = .000$ dan $r^2 = .5402$. Jadi di sini terjadi korelasi signifikan positif antara tingkat pemahaman politik dengan perilaku memilih. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa responden yang tingkat pemahaman politiknya baik maka perilaku memilihnya akan semakin aktif. Sebaliknya, perilaku memilih akan menurun apabila tingkat pemahaman politik responden kurang. Sementara itu keeratatan hubungan antara variabel pemahaman politik (X_1) dengan perilaku memilih (Y) dapat dikatakan kuat dan determinasi dari variabel X_1 secara linear terhadap Y sebesar 54,02%

(tergolong sedang). Disini terdapat indikasi bahwa dengan tingkat pemahaman politik yang memadai, orang akan semakin aktif memberikan dukungan terhadap partai pilihannya.

b Korelasi antara Identifikasi Kepartaian (X₂) dengan Perilaku Memilih (Y)

Korelasi yang terjadi di sini adalah korelasi signifikan positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasinya ($r_{X_2,Y}$) adalah .494 pada $p = .000$ dengan $r^2 = .244$. Temuan empiris ini menegaskan bahwa responden yang identifikasi kepartaiannya kuat maka perilaku memilihnya cenderung aktif. Demikian pula sebaliknya dengan identifikasi kepartaian yang lemah maka perilaku memilih responden pun akan menjadi tidak aktif atau bahkan sangat tidak aktif sama sekali. Walaupun demikian keeratan hubungan antara keduanya tergolong lemah dan pengaruh identifikasi kepartaian (X₂) terhadap perilaku memilih (Y) hanya sebesar 24,4% saja yang tergolong lemah pula. Temuan ini memberikan indikasi bahwa pemahaman politik yang berhubungan kognisi, afeksi dan evaluasi cenderung meningkatkan derajat aktivitas perilaku memilih.

Berdasarkan uraian sebelumnya terlihat bahwa korelasi antara pemahaman politik dengan perilaku memilih mempunyai derajat hubungan yang kuat, sedangkan korelasi antara identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih hanya berada pada derajat sedang. Korelasi antar variabel penelitian semuanya signifikan dengan probabilitas mencapai .000.

3. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang diajukan, perlu dilakukan terlebih dahulu analisis multi regresi. Analisis multi regresi merupakan metode untuk mengkaji akibat-akibat dan besarnya akibat dari lebih satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Kerlinger, 1993 : 929). Jadi dengan melakukan analisis ini kita dapat mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Disamping itu analisis ini juga bermanfaat untuk menemukan kontribusi relatif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat serta secara khusus menemukan variabel bebas apa yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien $X_1 = .833$, $X_2 = .084$, sedangkan besarnya konstanta = .385. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = .385 + .833 X_1 + .084 X_2$. Sementara itu koefisien determinasi berganda (R^2) yang dihasilkan = .5448, artinya variasi variabel terikat (dalam hal ini perilaku memilih) dijelaskan oleh variabel-variabel bebas pemahaman politik, serta identifikasi kepartaian sebesar 54,48%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebesar 45,52% lagi perilaku memilih dijelaskan oleh variabel lainnya.

Kontribusi dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dapat dikatakan sangat signifikan. Hal ini berdasarkan kepada F ratio yang diperoleh = 55,657 jauh lebih besar dari F kritis $(.01 ; 2 ; 93)$ yang hanya 4,026. Temuan ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengujian *hipotesis* yang menyatakan *terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman politik dan identifikasi kepartaian secara simultan terhadap perilaku memilih generasi muda*. Beranjak dari kenyataan dimana F ratio > F kritis maka H_0 ditolak dan H_a sebagaimana yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Kemungkinan salah atas penolakan H_0 sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas mencapai 0%.

Hal lain yang perlu dilacak adalah besarnya kontribusi relatif dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan koefisien regresi (*Beta*) maka kontribusi dari variabel pemahaman politik (X1) 68,16% ; dan identifikasi kepartaian 8,92%. Kontribusi relatif ini memberi petunjuk bahwa pemahaman politik memberikan pengaruh terbesar terhadap perilaku memilih generasi muda saat pemilu 1999 berlangsung, khususnya di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Oleh karena itu *hipotesis kedua* dari penelitian ini yang menyatakan bahwa *identifikasi kepartaian merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan perilaku memilih generasi muda* ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kontribusi terbesar terhadap perilaku memilih adalah pemahaman responden terhadap politik.

IV. KESIMPULAN

Generasi muda merupakan segmen pemilih yang relatif rasional-otonom untuk menentukan partai politik pilihannya dalam pemilu. Rasionalitas mereka bisa jadi terbangun karena pendidikannya yang relatif baik serta tingginya sentuhan media massa (*mass media exposure*) di era global ini. Apalagi pada saat menjelang pemilu 1999, media massa “santer” membicarakan isu-isu penting seperti demokratisasi, penyalahgunaan kekuasaan era Orde Baru, gugatan terhadap Dwi-fungsi ABRI, serta berbagai fenomena kehidupan politik lainnya.

Kondisi ini diyakini sebagai determinan penting yang membangun kognisi, afeksi serta evaluasi generasi muda terhadap realitas politik yang ada. Untuk selanjutnya hal ini akan berimplikasi terhadap kesadarannya untuk menentukan posisi dalam suatu kondisi politik termasuk dalam menyikapi program yang ditawarkan oleh kontestan dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. (1974). *Comparative Politics Today*. Little Brown and Co, Boston.

- Czudnowski, Moshe M. (1976). *Comparing Political Behavior*. Sage Publication Inc., London.
- Gaffar, Afan. (1992). *Javanese Voters : A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1992. "Menjelaskan Voting Behavior di Indonesia", *Seminar Nasional IX AIPI*, 6-8 Agustus, Surabaya
- Greenstein, Fred I. (1975). "Personality and Politics" dalam Fred I. Greenstein dan Nelson W. Polsby, *Micropolitical Theory - Handbook of Political Science Vol.2*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Imawan, Riswandha. (1993). *Analisis Hasil Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*. Laporan Penelitian - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Irish, Merian D. dan Elke Frank. (1978). *Introduction to Comparative Politics*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Kavanagh, Dennis. (1982). *Kebudayaan Politik*. Jakarta : Bina Aksara.
- Kerlinger, Fred N. (1993). diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pomper, Gerald. (1975). *Voter's Choice : Varieties of American Electoral Behavior*. New York : Doad, Mead Company.
- Surachmad, Winarno. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Wasby, Stephen L. (1970). *Political Science – The Discipline and Its Dimensions: An Introduction*. New York : Charles Scribner, Sons.